

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi merupakan perubahan atau perbaikan terhadap sistem yang sudah ada sebelumnya. Reformasi dapat diimplementasikan pada segala bidang, antara lain bidang hukum, politik, hukum, agama, pemerintahan, dan lain-lain. Dalam sistem keuangan di Indonesia tentunya terjadi reformasi, salah satunya adalah di bidang akuntansi pemerintah yaitu perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan sistem akuntansi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas laporan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan, dibutuhkan standar untuk dijadikan panutan atas perlakuan akuntansi yang sudah ditentukan. Terdapat empat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang menjadi pilar dalam sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia, antara lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-*International Financial Report Standard* (PSAK-IFRS), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP), PSAK-Syariah, dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Keempat standar tersebut memiliki pernyataan akuntansi yang berbeda-beda, pernyataan yang mengatur segala prosedur akuntansi pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP disusun oleh Komite

Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) berdiskusi dengan BPK dan Menteri Keuangan lalu meminta persetujuan Presiden RI dan kemudian diterbitkan peraturan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan pembaruan dari PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Tertera dalam PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pernyataan sebagai berikut: “Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.”

Laporan keuangan yang sudah mengimplementasikan SAP Berbasis Akrual diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dalam hal pencatatan sehingga menghasilkan susunan laporan keuangan yang lebih baik dari sebelumnya yang dimana masih belum berorientasi pada SAP Berbasis Akrual. Dengan perubahan ini diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih mendekati salah satu prinsip akuntansi yang menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Di dalam SAP Berbasis Akrual terdapat kerangka konseptual dan sejumlah PSAP yang menjelaskan pernyataan atas masing-masing komponen laporan keuangan. PSAP Berbasis Akrual No. 07 Tentang

Akuntansi Aset Tetap mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap yang menjadi dasar atas penyajian laporan keuangan yang bersangkutan dengan aset tetap. Aset tetap merupakan bagian penting aset pemerintah karena mempunyai nilai yang cukup signifikan daripada komponen lainnya.

Implementasi akan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berlaku efektif untuk pelaporan laporan keuangan mulai tahun anggaran 2010, namun bila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP tersebut, maka entitas dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju AkruaI dengan syarat selambat-lambatnya yaitu empat tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Menurut tanggal efektif yang sudah ditetapkan, sudah seharusnya di tahun 2020 ini semua entitas pemerintahan memberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. Kas Menuju AkruaI yang dimaksud adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI.

Berdasarkan beberapa jurnal yang sudah dibaca oleh peneliti, terdapat beberapa entitas pemerintah yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Tetap dalam menyajikan laporan keuangan khususnya untuk aset tetap, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

seberapa jauh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur. Peneliti berusaha mencari tahu upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta khususnya pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur dalam menyempurnakan penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap dan akan menyimpulkan apakah Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur telah mengimplementasikan PSAP tersebut dengan baik. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam karya ilmiah ini, antara lain :

1. Bagaimana kesesuaian sistem perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap?
2. Apa upaya yang diambil oleh Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur dalam menyempurnakan sistem pencatatan akuntansi supaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap?

C. Tujuan dan Manfaat

Peneliti memiliki tujuan dalam menulis karya ilmiah ini, antara lain:

1. Untuk memenuhi syarat meraih gelar Ahli Madya
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAP Berbasis AkruaI No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menyempurnakan kesesuaian penerapan PSAP Berbasis AkruaI No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, khususnya pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur

Ada pula beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian karya ilmiah ini. Manfaat penelitian tugas akhir karya ilmiah ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat dijadikan pengalaman bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian.
 - b. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait akuntansi aset tetap yang diterapkan pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.
 - c. Dapat menerapkan pengetahuan akuntansi yang sudah didapatkan selama perkuliahan pada penelitian karya ilmiah ini.
2. Bagi Fakultas
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup mengenai penerapan PSAP No. 07 Tentang Aset Tetap pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi dosen maupun fakultas sebagai dasar pembelajaran mata kuliah Akuntansi Pemerintah.
 - c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan bagi mahasiswa lain.
3. Bagi Instansi Terkait
- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk lebih menyempurnakan laporan keuangan khususnya aset tetap menyesuaikan dengan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap